FSI OPINION

Forumsinologi.id | 20 November 2026

Menuju Politik Kewargaan yang Inklusif: Arah Evolusi Partisipasi Politik Etnik Tionghoa

Lidya Christin Sinaga

Selain Tragedi Mei 1998, peristiwa September 1965 merupakan momen bersejarah yang berdampak terhadap eksistensi dan identitas etnik Tionghoa di Indonesia. Sudah enam dekade berlalu, apakah peristiwa ini masih menyisakan memori yang berdampak panjang hingga hari ini?

Dalam orasi ilmiah berjudul "Dampak G30S: Setengah Abad Historiografi Gerakan 30 September 1965", yang disampaikan pada 26 Juli 2018 di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Profesor Asvi Warman Adam menguraikan dengan tegas bagaimana peristiwa 1965 berdampak pada etnik Tionghoa. Menurut Asvi, "Stigma terhadap etnis Tionghoa dimulai dengan kesimpulan Simposium Angkatan Darat tahun 1966 yang diikuti dengan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Tahun 1967 yang mengganti istilah Tionghoa dan Tiongkok dengan Cina (dengan konotasi yang negatif). Komunitas ini wajib mengganti nama. Tiga pilar budaya Tionghoa (sekolah, pers, dan organisasi) dilarang."[1]

Salah satu dampak yang penting disorot adalah dampak peristiwa 1965 terhadap aktivisme Tionghoa di bidang politik. Riset yang dilakukan Tim Kajian Etnik Tionghoa Pusat Riset Politik BRIN, yang telah dibukukan dengan judul *Potret Pemenuhan Hak Sipil dan Politik Etnik Tionghoa di Singkawang dan Tangerang*, mengungkap bagaimana peristiwa 1965 dan dampak lanjutannya terhadap komunitas Tionghoa telah menimbulkan trauma yang berkepanjangan terhadap segala bentuk politik praktis.[2] Sebagaimana diakui oleh beberapa narasumber, trauma tersebut mewujud pada larangan berpolitik kepada generasi anak-cucunya. Sejarah Baperki, memori kolektif kekerasan etnik, terutama generasi tua yang mengalami langsung atau merasakan dampak berkepanjangan akibat peristiwa 1965 dan represi rezim Orde Baru, menjadi trauma sejarah yang diturunkan dan diwariskan dalam keluarga Tionghoa yang membuat politik menjadi barang tabu yang sebaiknya dihindari.

Setelah peristiwa September 1965, pola represi terus berlanjut dalam wujud marjinalisasi etnik Tionghoa dari dunia politik. Namun, situasi mulai berubah ketika demokratisasi dan perubahan sosial politik pasca-Orde Baru secara bertahap membuka ruang bagi partisipasi politik etnik Tionghoa yang dahulu terpinggirkan. Hingga hari ini, politik menjadi ruang yang terus berevolusi bagi etnik Tionghoa. Artinya, peran, posisi, dan keterlibatan masyarakat Tionghoa dalam panggung politik tidaklah statis, melainkan mengalami perubahan dan perkembangan yang signifikan dari satu era ke era berikutnya.

Evolusi ini tercermin melalui beberapa dinamika penting. Pertama, pergeseran dari marjinalisasi ke partisipasi aktif. Pada era Orde Baru, hak-hak politik etnik Tionghoa dibatasi secara ketat (depolitisasi) dan keterlibatan mereka lebih banyak diarahkan ke sektor ekonomi. Baru setelah Reformasi 1998, pintu politik kembali terbuka lebar. Hal ini dimanfaatkan secara bertahap oleh etnik Tionghoa, mulai dari kembali mendirikan partai politik, menjadi anggota legislatif, hingga menduduki jabatan publik di lembaga eksekutif (seperti kepala daerah dan menteri/wakil menteri). Setelah tahun 1998, partai politik yang dibentuk oleh etnik Tionghoa bermunculan. Di antara partai-partai tersebut adalah Partai Reformasi Tionghoa Indonesia yang didirikan oleh Lieus Sungkharisma; Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia (PBI) yang didirikan oleh Nurdin Purnomo; serta Partai Pembauran Indonesia (Parpindo) yang dibentuk oleh Jusuf Hamka. Ketiga partai di atas tidak lagi eksis hari ini. Namun, partisipasi orang Tionghoa dalam mendirikan partai politik masih terlihat, setidaknya dalam diri Hary Tanoesoedibjo, yang mendirikan Partai Persatuan Indonesia (Perindo). Pada saat yang sama, banyak individu etnik Tionghoa juga turut serta dalam kontestasi politik tingkat nasional maupun daerah, serta mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah. Puncaknya adalah pada Pemilu Serentak 2024 dengan meningkatnya jumlah perempuan dan generasi muda Tionghoa yang terjun dalam arena pemilu, baik untuk legislatif maupun eksekutif.

Kedua, pergeseran isu yang diusung dari identitas etnik ke politik kewargaan (*citizenship*). Partisipasi politik etnik Tionghoa kini telah berkembang dari sekadar memperjuangkan kepentingan atau perlindungan hak-hak kelompok etniknya, menjadi kontribusi aktif dalam isu-isu kebangsaan yang lebih luas (pembangunan, keadilan sosial, tata kelola pemerintahan, dan lainnya). Pergeseran ini terlihat dari perjuangan representasi politik etnik Tionghoa yang sebelumnya diarahkan bagi penyelesaian masalah kewarganegaraan dan identitas Tionghoa, kini telah bergeser menjadi isu politik kewargaan. Tahun 2006, Murdaya Poo, tokoh Tionghoa sekaligus anggota DPR RI saat itu, aktif mendorong RUU Inisiatif DPR menjadi UU Kewarganegaraan tahun 2006.[3] Pada tahun yang sama ia bersama rekannya, kemudian mendirikan Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI). Eddie Lembong, mantan Ketua Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) sekaligus pendiri Yayasan Nabil, meminta bantuan kepada Murdaya Poo untuk menyampaikan proposal pencabutan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Tahun 1967 kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.[4] Upaya ini membuahkan hasil dengan lahirnya Keppres No.12 Tahun 2014 soal aturan penyebutan kata “Tionghoa” menggantikan kata “Cina”, dan kata “Tiongkok” menggantikan kata “China” (merujuk pada negara) pada 12 Maret 2014. Namun dalam perkembangannya saat ini, nilai perjuangan, baik yang diusung individu Tionghoa melalui jalur partai politik ataupun non-parpol, telah bergeser pada isu politik kewargaan secara luas. Kalaupun masih terdapat persoalan yang bersinggungan dengan permasalahan terkait etnik Tionghoa, ia tidak lagi dibungkus sebagai isu eksklusif yang terkait satu etnik saja, namun ditempatkan dalam kerangka besar persoalan masyarakat secara luas. Keikutsertaan Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia (IPTI) dalam Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas yang mengajukan gugatan penyangkalan perkosaan massal Mei 1998 melawan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang diajukan pada April 2026 lalu,[5] merupakan wujud nyata arah baru partisipasi politik etnik Tionghoa yang tengah bergerak menuju politik kewargaan yang inklusif.

Dinamika ketiga yang dapat kita amati adalah terkait penerimaan publik yang semakin positif. Ruang politik yang terus berevolusi ini berkaitan pula dengan perubahan persepsi di masyarakat. Walaupun masih terdapat tantangan berupa sentimen prasangka atau politisasi identitas pada momen-momen tertentu, keterlibatan etnik Tionghoa dalam politik praktis kini dilihat semakin wajar dan diterima sebagai bagian dari hak konstitusional setiap warga negara Indonesia. Tingkat penerimaan publik ini setidaknya tergambar dari hasil Pemilu Serentak 2024 yang menunjukkan peningkatan elektabilitas kepala daerah etnik Tionghoa. Menariknya, jika pada pemilu-pemilu sebelumnya keberhasilan semacam ini hanya terlihat di wilayah dengan populasi Tionghoa yang signifikan, Pemilu 2024 justru mencatat terpilihnya sejumlah kepala daerah Tionghoa di daerah pemilihan yang tidak memiliki mayoritas penduduk Tionghoa. Bahkan, hal ini terjadi di wilayah yang mayoritas penduduknya menganut agama berbeda dengan kandidat Tionghoa terpilih tersebut. Terpilihnya Sherly Tjoanda, gubernur perempuan Tionghoa di Maluku Utara adalah salah satu contoh yang sangat menarik.

Hal keempat adalah adanya diversifikasi pandangan politik di kalangan masyarakat Tionghoa. Artinya, Tionghoa tidak boleh lagi dipandang sebagai satu kelompok tunggal dengan aspirasi politik yang homogen. Apalagi dengan masifnya kemajuan media sosial yang membuat ruang informasi, komunikasi, dan interaksi semakin terbuka luas, dan faktor perbedaan generasi dengan pengalaman sejarah yang berbeda, turut mempengaruhi diversifikasi pandangan politik ini. Pilihan politik etnik Tionghoa kini sangat beragam dan tersebar di berbagai spektrum serta partai politik. Partisipasi politik warga Tionghoa di tingkat nasional kini tidak lagi didasarkan pada etnisitas, meskipun di tingkat lokal dan individu, konformitas identitas masih banyak menjadi faktor yang mempengaruhi pilihan. Pada pemilihan presiden 2024, kita melihat bagaimana di semua kandidat calon presiden terdapat komunitas-komunitas yang membawa identitas Tionghoa sebagai tim pendukung. Diversifikasi pandangan politik ini membuat identitas Tionghoa tidak lagi dipolitisasi, tapi justru dimobilisasi guna mendapat dukungan suara.

Peristiwa 1965 dan dampaknya terhadap etnik Tionghoa, pernah menjadi luka sejarah dalam memori kolektif kelompok etnik ini. Namun, perkembangan yang terjadi saat ini menunjukkan bagaimana memori kolektif dan demokrasi telah berjuang bersama untuk membangun Indonesia yang lebih inklusif. Walau secara perlahan dan banyak tantangan, evolusi ruang politik ini menjadi sinyalemen penting bahwa demokratisasi kita telah mampu menciptakan ruang perjumpaan yang setara, baik perjumpaan narasi maupun interaksi secara langsung, terutama bagi kelompok etnik Tionghoa. Geliat partisipasi politik Tionghoa yang terus meningkat, terutama dari kalangan generasi muda dan perempuan, membuka suatu optimisme akan masa depan politik Indonesia yang inklusif karena menandai lahirnya generasi yang sudah mampu menanggalkan segala trauma masa lalu yang diwariskan. Kini, generasi muda Tionghoa tumbuh dengan cara pandang yang berbeda. Warisan ingatan kolektif justru membuat mereka terlibat aktif dalam kerja-kerja komunitas, peduli pada isu di sekitarnya dan isu-isu kebangsaan, serta ingin memastikan pengalaman keluarga di masa lalu tidak terulang lagi. Geliat baru ini tidak melulu harus dibaca karena ingin masuk ke politik, tetapi karena tumbuhnya kesadaran bahwa ruang hidup bersama terasa semakin penting untuk dijaga.

Evolusi yang telah penulis sampaikan dalam artikel ini bukanlah sebuah proses yang telah selesai dan berakhir. Ketika ruang sudah terbuka, tugas penting selanjutnya adalah bagaimana mengisi ruang ini menjadi bermakna. Selain itu, pertanyaan yang perlu juga kita ajukan adalah bagaimana mempertahankan agar ruang ini terus terbuka dan setara.

Lidya Christin Sinaga, Peneliti Pusat Riset Politik, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Referensi:

[1] Asvi Warman Adam, *Dampak G30S: Setengah Abad Historiografi Gerakan 30 September 1965*, (Jakarta: LIPI, 2018).
[2] Lidya Christin Sinaga (ed.), *Potret Pemenuhan Hak Sipil dan Politik Etnik Tionghoa di Singkawang dan Tangerang,* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2023).
[3] Asvi Warman Adam, "Sejarah Partisipasi Politik Tionghoa", *Newsletter SETARA, Vol. 4, No. 1* (2024).
[4] Leo Suryadinata, *Pribumi, Minoritas Tionghoa dan China*, (Jakarta: Penerbit Buku KOMPAS, 2023).
[5] YLBHI, "Koalisi Serahkan Kesimpulan Gugatan Penyangkalan Perkosaan Massal Mei 1998: Meniti Harapan, Menegakkan Keadilan", 7 Februari 2026, tersedia daring https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/koalisi-serahkan-kesimpulan-gugatan-penyangkalan-perkosaan-massal-mei-1998-meniti-harapan-menegakkan-keadilan/ (diakses 18 November 2026).